

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Rasyid, Harun *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Arifin, Firdus, dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, *Sistem Operasi dan Prosedur Pelayanan Kepegawaian*, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Sleman, 2019.
- Busroh, Abu Daud *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Champbell, Henry, *Black Law Dictionary*, West Publishing.Co, 1978.
- Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Diktat HAN*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Hartini, Sri, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2002.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, 2017.
- Jeddawi, Murtir, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Logeman, JHA, *Tentang Teori Suatu Hukum Negara Positif*, Diterjemahkan oleh Mangkatutu dan Pangkerego, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975.
- Manan, Bagir *Peraturan Kebijaksanaan*, Jakarta, 1994.
- Manan, Bagir *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Marbun, SF, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Group, Jakarta, 2007.
- Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 200.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Kajian Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986.
- Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusamedia, Bandung, 2008.
- Sudrajad, *Achmad Memahami Peraturan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Badan Kepegawaian Negara, 2022.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Syafruddin, Ateng, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Graha Pustaka Abadi, Jakarta, 2012.
- Syahrial, Darda, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djinjang, Ichtar Baru, Jakarta, 1985.
- Van Wijk, HD, *Hoofdstuken van Adminiestartif Recht*, Culembrog, Uitgeverij LEMMA BV, 1988.

Jurnal

- Apendi, Sofyan Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional, *Pakuan Law Review*, Vol.7, No.1, 2021.
- Ardiansyah, Raihan, Diskresi Dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI/Polri, Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.1, No.3, 2023
- Gandara, Moh, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. II No. 3, 23 November 2020.
- Koraag, Satria Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 7, 2021.
- Kusuma, Mochamad Tommy, Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024, *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol 2, No 2, 2023.

- M.Hadjon, Philipus, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Manan, Bagir, Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, UNPAD, Bandung, 1990.
- Marwi, Akhmad, Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2016.
- Pamungkas, Catur Agil, dan Anom Wahyu Asmoro Jati, Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Dalam Negeri, Unizar Law Review : Media Law and Sharia Jurnal, 2023.
- Pratama, Alfani Aldi, Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, Nomor 1, 2024.
- Rahmatunisa, Mudiwati, Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Pada Era Reformasi, Jurnal Universitas Padjadjaran, 2015.
- Rahmazani, Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024, Jurnal Konstitusi, Vol 20, No 2, 2023.
- Sufianto, Dadang, Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal Academia Praja, 2020.
- Supriyadi, Ady, Kedudukan Peraturan Menteri Di Tinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, , Vol. 4, Issue 2, 2021.
- Syafruddin, Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Vol. IV, No 1, Jurnal Pro Justitia Universitas Parahyan Bandung, 2000.
- Tesano, Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, Vol 11, No. 2, 2015.
- Umam, Muhammad Amar Khoerul, dan Fitriani A. Sjarif, Pengaturan Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan, Pakuan Law Review, 2021.
- Yarni, Meri Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 7, No. 2, 2022.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)
- Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310)
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384)

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K .26-30 IV .100 -2 | 99 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah

Media Online

Hukum Online, Kontroversi Surat Edaran: Belajar dari SE Mendagri tentang Penjabat Kepala Daerah, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt634e18c258d5e/kontroversi-surat-edaran--belajar-dari-se-mendagri-tentang-penjabat-kepala-daerah/#>.

Hukumonline.com, 16 Mei 2011, MA Bisa Batalkan Surat Edaran, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-bisa-batalkan-surat-edaran--lt4dd0fc7f2d93f/>, Diakses pada 11 April 2024.

Inikata.co.id, 11 Oktober 2023, “Belum Sebulan Menjabat Sudah Lakukan Mutasi Pegawai, Pj Wali Kota Palopo Labrak Aturan?”, <https://inikata.co.id/2023/10/11/belum-sebulan-menjabat-sudah-lakukan-mutasi-pegawai-pj-wali-kota-palopo-labrak-aturan/>.

Kominfo Munabarat, Usai Mutasi dan Rotasi 196 Pejabat, Pj Bupati Mubar Ingatkan Tak Alergi Pada Press, <https://kominfo.munabarat.go.id/berita/usai-mutasi-dan-rotasi-196-pejabat-pj-bupati-mubar-ingatkan-tak-alergi-terhadap-pers/>.

Ombudsman RI, 23 September 2022, Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Pecat hingga Mutasi Pegawai, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--soal-se-mendagri-pj-kepala-daerah-bisa-mutasi-pns-ombudsman-sebut-tak-ada-mekanisme-kontrol-mutasi>.

Pikiran Rakyat, 19 November 2023, Lakukan Mutasi ASN, Pj. Bupati Mamasa Diduga Abaikan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, Melanggar?, <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117376608/lakukan-mutasi-asn-pj-bupati-mamasa-diduga-abaikan-permendagri-nomor-4-tahun-2023-melanggar?page=2>.

Portal DPD, 20 Maret, 2023, Polemik SE Mutasi ASN, Senator Filep Minta Mendagri Segera Tinjau Ulang, <https://dpd.go.id/daftar-berita/polemik-se-mutasi-asn-senator-filep-minta-mendagri-segera-tinjau-ulang>.